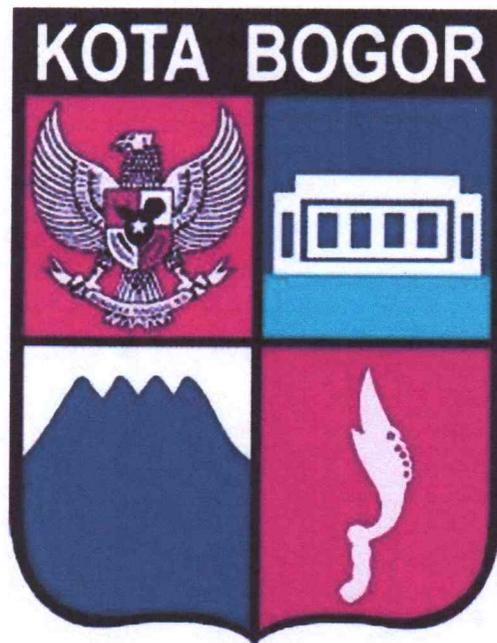




# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2023



DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BOGOR



## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor ini menginformasikan secara rinci upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan pada sumber daya keuangan, manusia dan sarana prasarana yang dimiliki secara transparan dengan harapan semoga laporan ini dapat memenuhi kebutuhan informasi berbagai pihak yang berkepentingan.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, maka perlu untuk dilaporkan hasil kinerja pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, hal tersebut didasari oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja yang disajikan menggambarkan hasil kinerja dari tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor selama satu tahun sebagai upaya terselenggaranya pemerintah yang baik, akuntabel, transparan dan responsif terhadap aspirasi masyarakat serta dapat dikontrol oleh semua pihak.

LKIP ini disusun dengan menggunakan data realisasi kinerja yang ada pada sekretariat dan bidang-bidang di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor. Materi LKIP mengandung analisis Pencapaian sasaran serta pengukuran atas kegiatan, program dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor.

LKIP juga memuat informasi mengenai pencapaian tujuan dan sasaran, dan dapat digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya pada masa mendatang, diharapkan LKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor tahun 2023 ini dapat dijadikan media untuk membangun kebersamaan berdasarkan kesadaran dan komitmen bersama yang dilandasi sikap kekeluargaan, kejujuran, dan ketulusan untuk berbuat yang terbaik bagi pembangunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor selanjutnya.



Disadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini belumlah sempurna, hal ini antara lain disebabkan kemampuan dan pemahaman yang mungkin masih berbeda dan memerlukan penambahan wawasan yang lebih komprehensif, untuk itu kami membuka diri menerima saran dan masukan dari semua pihak sebagai bahan bagi kami untuk melakukan penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Bogor, Februari 2024  
Kepala Dinas Pariwisata dan  
Kebudayaan Kota Bogor



**ICEU PUJATI, S.H, M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196908051998032007



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	2
1.3. Cascading Kinerja .....	2
1.4. Peta Proses Bisnis .....	3
1.5. Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Susunan Organisasi .....	4
1.6. Isu – Isu Strategis .....	5
1.7. Tindaklanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2022 ...	6
1.8. Dasar Hukum .....	7
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	9
2.1. Perencanaan Strategis .....	9
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	13
2.3. Rencana Anggaran Tahun 2023 .....	14
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1. Capaian Kinerja .....	15
3.2. Realisasi Anggaran.....	25
3.3. Analisis Efisiensi.....	25
<b>BAB IV PENUTUP</b>	26
4.1. Kesimpulan.....	26
4.2. Rekomendasi.....	26



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

LKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor tahun 2023 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor yang telah dicanangkan pada tahun 2023 telah berhasil dicapai.

Dari 5 indikator kinerja utama Dinas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor tahun 2023, menunjukkan bahwa capaian pada ketiga indikator kinerja utama sudah masuk pada kategori sangat tinggi. Pencapaian IKU pada sasaran strategis Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni dan budaya dengan indikator kinerja Presentase peningkatan jumlah pelaku seni/ budaya dimana pencapaiannya mencapai 248,05%, sasaran strategis Meningkatnya kunjungan wisata di Kota Bogor dengan indikator Indikator Kinerja Jumlah kunjungan wisatawan dimana pencapaiannya mencapai 109,21% serta pada sasaran strategis Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif di Kota Bogor dengan indikator kinerja Jumlah Pelaku ekonomi Kreatif baru dengan pencapaian sebesar 185,71 %



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor .....	5
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor 2019-2024 .....	7
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Disparbud Kota Bogor.....	8
Tabel 2.3	Rencana Belanja Disparbud Kota Bogor .....	9
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	11
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Sasaran.....	12
Tabel 3.3	Pengukuran Kinerja Indikator Presentase peningkatan jumlah pelaku seni/ budaya .....	13
Tabel 3.4	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran ....	13
Tabel 3.5	Nilai PMPRB Dinas Pariwisata dan Kebudayaan .....	14
Tabel 3.6	Persentase kunjungan wisatawan dan jumlah kunjungan wisatawan .....	19
Tabel 3.7	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran ....	19
Tabel 3.8	Pengukuran Kinerja Indikator Jumlah pelaku ekonomi kreatif baru .....	20
Tabel 3.9	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran ....	21
Tabel 4.1	Capaian IKU Disparbud Tahun 2022 .....	23



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 mengamanatkan agar instansi pemerintah melakukan pelaporan terhadap pelaksanaan anggaran dan kinerja. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun rencana yang didukung oleh pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) baik nasional maupun daerah. Kewajiban ini merupakan salah satu bukti tertulis akan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Pada perkembangannya, amanat ini dikuatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang memperluas tujuan pelaporan sebagai salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang bebas serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di dalamnya, akuntabilitas kinerja menjadi bagian dari delapan area perubahan yang menjadi fokus dari reformasi birokrasi. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ditetapkan dan mempertegas urgensi pertanggungjawaban pencapaian kinerja terutama sebagai penggambaran upaya dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor Tahun 2023 merupakan upaya dalam memenuhi amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana di atas. Namun tidak hanya itu, pelaporan ini juga merupakan media penyampaian informasi pencapaian kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kepada para stakeholder. Sehingga, sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2023 dapat dinyatakan berhasil atau tidak berhasil dicapai. Pernyataan tersebut bermanfaat bagi stakeholder untuk melihat posisi pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Disparbud Kota Bogor.

## 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan LKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor dimaksudkan sebagai penyampaian pertanggungjawaban pencapaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2023. Adapun tujuan dari penyusunan LKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor Tahun 2023 adalah sebagai penyajian ketercapaian sasaran dan target kinerja utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor Tahun 2023, penggambaran upaya yang dilakukan untuk pencapaian kinerja, efisiensi pemanfaatan anggaran, serta sebagai evaluasi bagi perbaikan perencanaan kinerja di masa datang.

## 1.3. CASCADING KINERJA

Sesuai dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja yang telah di terapkan oleh Pemerintah Kota Bogor, yang mana setiap Perangkat Daerah agar memberikan kontribusi pada capaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019- 2024. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor dibentuk dengan skema cascading kinerja sebagai berikut :

**Gambar Cascading Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor**

VISI : "TERWUJUDNYA KOTA BOGOR SEBAGAI KOTA YANG RAMAH KELUARGA"						
Misi 2 : MEWUJUDKAN KOTA BOGOR YANG CERDAS						
RPJMD	Tujuan 2.1 : Terwujudnya Masyarakat Kota Bogor yang Cerdas dan Berkarakter (Smart People)			Tujuan 2.2 : Terwujudnya Pemerintahan yang Cerdas dan melayani (Smart government),		
	Indikator Tujuan : Indeks Pembangunan Gender (IPG)			Indikator Tujuan : Indeks Reformasi Birokrasi		
	Sasaran 4 : Meningkatkan pemberdayaan, partisipasi, gotong royong, kerukunan, toleransi dan ketertarikan ketertiban masyarakat			Sasaran 1 : Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel		
	Indikator Sasaran : Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			Indikator Sasaran : Nilai Indeks Reformasi Birokrasi di lingkungan Perangkat Daerah		
REKSTRATA	Tujuan 1 : Terwujudnya pelestarian budaya			Tujuan 1 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor		
	Persentase peningkatan jumlah pelaku seni dan budaya			Indeks Refomasi Birokrasi		
	Sasaran 1 : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni dan budaya			Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel di lingkup Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor		
	Persentase peningkatan jumlah pelaku seni dan budaya			Nilai Indeks Reformasi Birokrasi di lingkungan Perangkat Daerah		
PROGRAM	Program Pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Program Pembinaan Sejarah	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Program Pengelolaan Permuseuman	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
	Sasaran: Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni dan budaya					Sasaran: Meningkatnya Kualitas Tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel di lingkup Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor
	Indikator: Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Indikator: Persentase peningkatan jumlah pelaku dan lembaga kesenian tradisional	Indikator: 1. Jumlah ketersediaan sarana & prasarana pembinaan sejarah 2. Jumlah ketersediaan SDM Pembinaan Sejarah	Indikator: Jumlah cagar budaya yang dikelola dan dilestarikan	Indikator: Persentase peningkatan kunjungan ke museum	Indikator: Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah

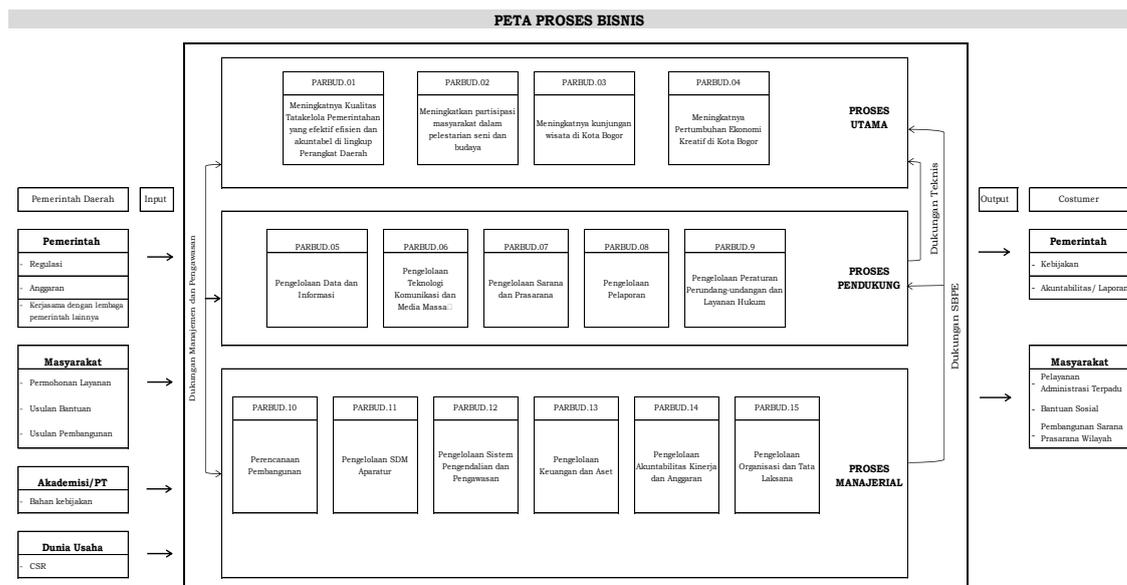


RPIMD	VISI : "TERWUJUDNYA KOTA BOGOR SEBAGAI KOTA YANG RAMAH KELUARGA"			
	Misi 3 : MEWUJUDKAN KOTA BOGOR YANG SEJAHTERA			
	Tujuan 2 : Terwujudnya Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah		Tujuan 1 : Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
	Indikator Tujuan : Laju Pertumbuhan Ekonomi		Indikator Tujuan : Indeks Gini Rasio	
	Sasaran 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi		Sasaran 1 : Menurunnya Tingkat Pengangguran	
	Indikator Sasaran : PDRB Perkapita (Atas Dasar Harga Berlaku)		Indikator Sasaran : Tingkat Pengangguran Terbuka	
RENSTRA	Tujuan 1 : Terwujudnya daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Bogor			
	1. Persentase kunjungan wisatawan 2. Jumlah Kunjungan wisatawan			
	Sasaran 1 : Sasaran Meningkatnya kunjungan wisata di Kota Bogor		Sasaran 1 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif di Kota Bogor	
	1. Persentase kunjungan wisatawan 2. Jumlah Kunjungan wisatawan		Jumlah jenis produk ekonomi kreatif yang teresrap pasar	
PROGRAM	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Program Pemasaran Pariwisata
	Sasaran: Meningkatnya kunjungan wisata di Kota Bogor	Sasaran: Meningkatnya kunjungan wisata di Kota Bogor	Sasaran: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif di Kota Bogor	Sasaran: Meningkatnya kunjungan wisata di Kota Bogor
	Indikator: 1. Tingkat Hunian akomodasi 2. Persentase Kunjungan Wisatawan	Indikator: 1. Persentase SDM pariwisata yang disertifikasi	Indikator: 2. Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Baru	Indikator: Jumlah Kunjungan Wisatawan
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAK Kekayaan Intelektual		Sasaran: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif di Kota Bogor
				Indikator: Jumlah jenis produk ekonomi kreatif yang teresrap pasar

### 1.4. PETA PROSES BISNIS

Peta Proses Bisnis pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar Peta Proses Bisnis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor**





### **1.5. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA SUSUNAN ORGANISASI**

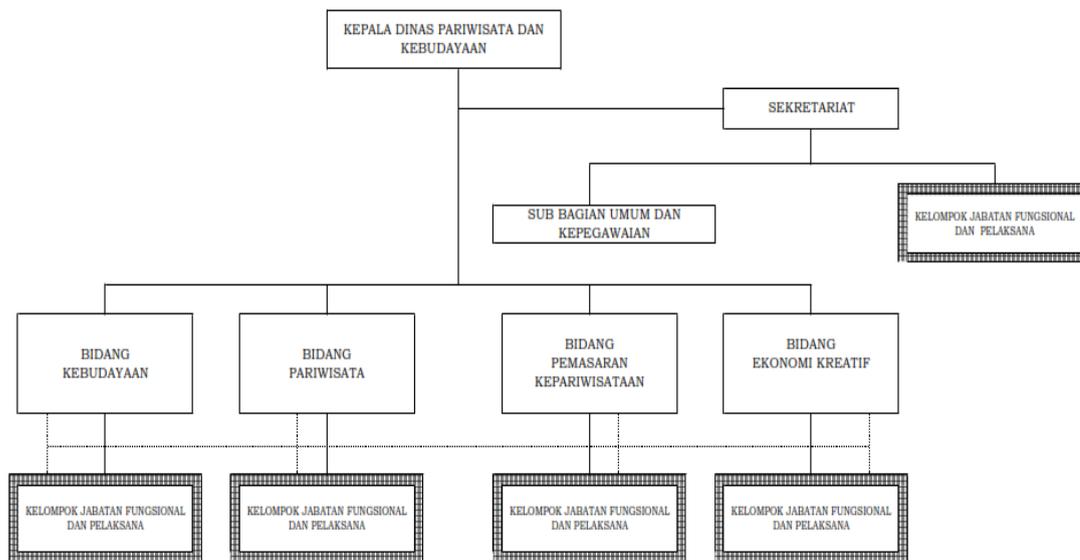
Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural Di Lingkungan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memiliki tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Wali Kota. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepariwisataan dan kebudayaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepariwisataan dan kebudayaan;
- c. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kepariwisataan dan kebudayaan;
- d. Pembinaan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kepariwisataan dan kebudayaan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahkan
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
3. Bidang Kebudayaan membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
4. Bidang Pariwisata membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
5. Bidang Pemasaran Kepariwisataaan membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
6. Bidang Ekonomi Kreatif membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

8. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN TIPE A



Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia per 31 Desember 2023, pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor Berjumlah 49 orang. Secara komposisi, jumlah tersebut didominasi oleh 35 orang ASN dan 14 orang non ASN.

Tabel 1.1  
Komposisi Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor

No	Disparbud	Data Disparbud		Pendidikan						Jabatan			
		PNS	NON PNS	S2	S1	D3/ D2/ D1	SLTA/ Sederajat	SLTP	SD	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	JF
1	Laki - Laki	17	12	5	10	2	15	0	0	0	4	0	6
2	Perempuan	18	2	6	9	0	2	0	0	1	1	1	7
Jumlah		35	14	11	19	2	17	0	0	1	5	1	13
<b>Jumlah Keseluruhan = 49</b>													

### 1.6. ISU-ISU STRATEGIS

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor Tahun 2019-2024 dan didasarkan hasil analisis lingkungan strategis eksternal dan internal serta perhatian khusus, isu strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor yaitu:



1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan warisan budaya;
2. Terpeliharanya kelestarian warisan budaya;
3. Penguatan daya saing usaha mikro kecil dan menengah, sector ekonomi kreatif, industri dan perdagangan, serta pariwisata berbasis pada potensi lokal

### 1.7. TINDAKLANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP 2022

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor Tahun 2023 yang menilai akuntabilitas kinerja tahun 2022, terdapat 8 rekomendasi yang seluruhnya telah ditindaklanjuti.

Adapun rekomendasi dan tindak lanjut rekomendasi dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel Tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2023**

NO	REKOMENDASI	TINDAKLANJUT	PELAKSANAAN	
			SUDAH	BELUM
1	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja/capaian target dalam dokumen rencana aksi secara periodik minimal setiap 3 bulan secara berkala kemajuannya.	telah dilakukan Monitoring Rencana Aksi Tahun 2023 secara berkala melalui Evaluasi RKPD PD	√	
2	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor untuk Pembuatan/penyusunan Dokumen Laporan Kinerja harus dilakukan revidi secara berjenjang.	telah dilakukan rapat pembahasan capaian kinerja tahun 2023	√	
3	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor untuk Informasi dalam laporan kinerja <b>harus selalu</b> menjadi perhatian utama pimpinan dan didukung dengan melampirkan/ mengupload: Daftar Hadir, Notulen Rapat, dan Dokumentasi.	telah dilakukan rapat pembahasan capaian kinerja tahun 2023	√	
4	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor untuk Penyajian informasi dalam laporan kinerja <b>harus menjadi</b> kepedulian seluruh pegawai dan didukung dengan melampirkan/ mengupload: Daftar Hadir, Notulen Rapat, dan Dokumentasi.	telah dilakukan rapat pembahasan capaian kinerja tahun 2023	√	



NO	REKOMENDASI	TINDAKLANJUT	PELAKSANAAN	
			SUDAH	BELUM
5	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor untuk segera menyelesaikan semua tindak lanjut atas rekomendasi hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja tahun sebelumnya.	telah dilaksanakan tindaklanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya	√	
6	Perangkat Daerah untuk segera menyelesaikan tindaklanjut seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	telah dilaksanakan tindaklanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya	√	
7	Dalam upaya peningkatan implementasi AKIP, Perangkat Daerah untuk segera melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal.	Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022 dan Tahun 2023	√	
8	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal harus dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja bagi Perangkat Daerah.	Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022 dan Tahun 2023	√	

### 1.8. DASAR HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor Tahun 2022 mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang



- Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 11); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 5);
  10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor;
  11. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 144);
  12. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor;
  13. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2019 – 2024.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. PERENCANAAN STRATEGIS**

##### **A. Visi dan Misi**

Penentuan visi pembangunan dengan misi dan strategi pencapaiannya amatlah penting, agar proses pembangunan dapat dilaksanakan dengan arah dan kebijakan yang jelas. Berhubung dengan itu, untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah ke depan, maka visi pembangunan Kota Bogor untuk jangka waktu 2019-2024 adalah sebagai berikut:

**“Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Keluarga”**

Adapun visi tersebut dapat dipandang dari ruang lingkup sebagai berikut :

**Kota Bogor** : Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bogor dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor.

**Kota yang Ramah Keluarga** dapat diartikan sebagai berikut:

1. Kondisi ramah keluarga dipenuhi dari derajat kualitas masyarakat dan lingkungannya yang memadai, yang tercermin dari kondisi kesehatan, pendidikan, sosial masyarakatnya serta kondisi infrastruktur lingkungan yang baik dalam mendukung aktivitas masyarakat menuju taraf kehidupan yang lebih baik.
2. Kondisi ramah keluarga juga harus dipenuhi dari kondisi sektor ekonomi yang kondusif bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.
3. Kondisi ramah keluarga dipenuhi dari pencapaian keluarga yang berkualitas oleh masyarakat serta menumbuh kembangkan nilai-nilai keluarga dalam hubungan bermasyarakat serta tata kelola pemerintahan yang berkompeten.



Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal, maka ditetapkan 3 (tiga) misi untuk mewujudkan Visi Kota Bogor pada Tahun 2024. Adapun 3 (tiga) Misi yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Kota Bogor 2019-2024 yaitu :

1. Mewujudkan Kota Bogor yang Sehat

Kota Bogor yang Sehat adalah suatu kondisi kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Kota yang sehat dapat dicapai melalui upaya menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan baik fisik, sosial, dan budaya serta mengintegrasikan berbagai aspek tersebut untuk mewujudkan kondisi kota yang bersih nyaman, aman dan sehat.

2. Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas

Kota Bogor yang Cerdas adalah kota yang bisa mengelola sumber dayanya, termasuk sumber daya alam dan manusia, sehingga warganya dapat hidup aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat diperlukan untuk membantu pengelolaan kota.

Kota Cerdas dapat mengetahui permasalahan yang ada di dalamnya (sensing), memahami kondisi permasalahannya (understanding), dan mengatur/mengambil tindakan (acting) berbagai sumber daya yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Kota Cerdas bukan "kota" ditambah "teknologi" namun penggunaan solusi cerdas untuk mengatasi permasalahan kota. Teknologi merupakan salah satu alat bantu untuk pengelolaan guna mengatasi permasalahan kota.

3. Mewujudkan Kota Bogor yang Sejahtera

Kota Bogor Yang Sejahtera adalah suatu kondisi Kota dimana kehidupan masyarakatnya aman, tentram, damai, adil dan makmur.



Dalam sosial ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan kemudahan masyarakat untuk menjangkau pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Kondisi adil dan makmur dapat diukur dari tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakatnya. Semakin rendah kesenjangan sosial ekonomi masyarakat merupakan tolok ukur dari keberhasilan perwujudan kota yang sejahtera. Kota yang sejahtera dapat terwujud apabila kondisi perekonomian masyarakat kota meningkat. Ekonomi masyarakat yang adil dan sejahtera sebagaimana dicita-citakan akan dapat diwujudkan dengan upaya meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi daerah.

Daya saing daerah sendiri merupakan kemampuan daerah untuk menumbuhkembangkan daerah yang bersangkutan yang direfleksikan pada adanya pertumbuhan ekonomi yang kuat, peningkatan daya beli, kemakmuran rakyat, dan kualitas diri rakyat (masyarakat), tingginya daya tarik daerah bersangkutan bagi para investor luar untuk berinvestasi dan berbisnis, dan kemampuan daerah itu menghasilkan outputnya (produk atau jasa) untuk bersaing dan menang dalam persaingan dengan output (produk atau jasa) yang dihasilkan pihak lain di luar daerah yang bersangkutan secara global.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor mendukung Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2019-2024 dengan cara berperan aktif dalam setiap misi melalui program-program untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan.

Dengan berlakunya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka dilakukan pemetaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Disparbud Kota Bogor.

Adapun program hasil pemetaan yang mendukung masing-masing misi adalah:



- Misi 2 “Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas” didukung oleh 5 (lima) program, yaitu:
  1. Program Pengembangan Kebudayaan
  2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
  3. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
  4. Program Pengelolaan Permuseuman
  5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
- Misi 3 “Mewujudkan Kota Bogor yang Sejahtera” didukung oleh 4 (empat) program yaitu:
  1. Program Peningkatan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota
  2. Program Pemasaran Pariwisata
  3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
  4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

## B. Tujuan dan Sasaran

Dalam mendukung visi Kota Bogor tersebut Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor menjabarkan dalam 3 tujuan, 4 sasaran strategis dan 5 indikator sasaran.

Tabel 2.1  
Tujuan dan Sasaran Strategis  
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor 2019-2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	Terwujudnya pelestarian budaya	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni dan budaya	Presentase peningkatan jumlah pelaku seni/ budaya
2	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Disparbud	Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel di lingkup Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi di lingkungan Perangkat Daerah
3	Terwujudnya daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Bogor	Meningkatnya kunjungan wisata di Kota Bogor	Persentase kunjungan wisatawan Jumlah kunjungan wisatawan
		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif di Kota Bogor	Jumlah Pelaku ekonomi Kreatif baru

## 2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan/ kesepakatan/ perjanjian kinerja antara pimpinan dan staff untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan suatu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran.

Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Perubahan Rencana Stretegis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor Tahun 2019 – 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor Tahun 2023 sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2023. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dibuat sebagai bentuk komitmen pimpinan dalam pencapaian target kinerja pembangunan.

Tabel 2.2  
Perjanjian Kinerja DISPARBUD Kota Bogor

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni dan budaya	Presentase peningkatan jumlah pelaku seni/ budaya	30.84 %
2	Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel di lingkup Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi di lingkungan Perangkat Daerah	Nilai 81
3	Meningkatnya kunjungan wisata di Kota Bogor	Persentase kunjungan wisatawan	23.67 %
		Jumlah kunjungan wisatawan	5.174.645 orang
4	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif di Kota Bogor	Jumlah Pelaku ekonomi Kreatif baru	35 pelaku



### 2.3. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.30.962.485.665,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Operasi dan Belanja Modal. Secara rinci Anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor pada Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3  
Rencana Belanja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor Tahun 2023

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Rencana (Rp.)</b>	<b>%</b>
1	Belanja Operasi	Rp. 14.027.921.665	45.31 %
2	Belanja Modal	Rp. 16.934.564.500	54.69 %
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 30.962.485.665</b>	

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1. CAPAIAN KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Sistem akuntabilitas kinerja pemerintah bertujuan untuk membangun pemerintah yang akuntabel dan terukur serta mampu mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat kerjanya bagi masyarakat termasuk atas penggunaan anggaran yang dikelolanya.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas kinerja perangkat daerah dapat dilakukan melalui pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yaitu pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/ kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang

diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagai berikut:

Tabel 3.1.  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 ≤	Sangat tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Capaian kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor tercermin dari capaian 4 Sasaran Strategis Renstra dan 5 Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian kinerja tersebut merupakan buah dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor pada Tahun 2023 rata-rata sebesar 93.68%. Sebanyak 4 indikator pencapaian kinerja 100% atau lebih dan sebanyak 1 indikator tidak mencapai 100%. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2  
Capaian Kinerja Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni dan budaya	Presentase peningkatan jumlah pelaku seni/ budaya	30,84%	76,50 %	248,05 %
2	Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel di lingkup Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi di lingkungan Perangkat Daerah	81 poin	78,08 poin	96,39%
3	Meningkatnya kunjungan wisata di Kota Bogor	Persentase kunjungan wisatawan	23.67 %	22,78 %	96,24%
		Jumlah kunjungan wisatawan	5.174.645 orang	5.650.637 orang	109,21 %
4	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif di Kota Bogor	Jumlah Pelaku ekonomi Kreatif baru	35 pelaku	65 pelaku	185,71 %

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat kita lihat bahwa dari 5 indikator yang dijadikan penanda terhadap 3 sasaran strategis, sebanyak 3 indikator kinerja sasaran melebihi target dan 2 indikator tidak mencapai target. Secara umum rata-rata pencapaian sasaran sebesar 100 % sehingga terkategori ke dalam kriteria penilaian realisasi kinerja yang sangat tinggi.

Pengukuran, evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran strategis secara lebih rinci dijelaskan sebagai berikut :

**Sasaran ke 1 :**

**Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni dan budaya**

Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor menetapkan indikator Presentase peningkatan jumlah pelaku seni/ budaya dengan target tahun 2023 sebesar 30,84 %.

Tabel 3.3  
Pengukuran Kinerja Indikator Presentase peningkatan jumlah pelaku seni/ budaya

Indikator Kinerja	2022	2023			Akhir Renstra		Provi nsi	Nasi onal
	Reali sasi	Target	Reali sasi	%	Target	%		
Presentase peningkatan jumlah pelaku seni/budaya	30,84 %	30,84 %	76,50 %	248 %	31 %	246 %	-	-

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa capaian sasaran Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni dan budaya dengan indikator Presentase peningkatan jumlah pelaku seni/ budaya sebesar 76,50 % dari target 30,84 % terealisasi sebesar 248 % menunjukkan capaian yang sangat tinggi.

Faktor yang mendukung Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Seni dan Budaya yaitu ditandai dengan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya sebesar 41 event Kondisi tersebut didorong oleh terlaksananya pengelolaan kebudayaan dengan realisasi sebanyak 2 kegiatan dan terlaksananya pelestarian kesenian tradisional dengan realisasi sebanyak 2 kegiatan Adapun upaya – upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi diatas adalah Tersedianya Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan sebanyak 2 objek, Tersedianya Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan sebanyak 1 objek.

Selain itu, Faktor keberhasilan yang mendukung Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Seni dan Budaya yaitu ditandai dengan Meningkatnya peran serta pelaku dan Lembaga Kesenian Tradisional



dalam pelestarian seni dan budaya sebesar 76,50% Kondisi tersebut didorong oleh Terlaksananya Pembinaan lembaga seni dengan realisasi sebesar 20 orang/lembaga. Adapun upaya – upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi diatas adalah Tersedianya Data Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya sebanyak 20 lembaga.

Selanjutnya faktor yang mendukung Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Seni dan Budaya adalah Meningkatnya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya sebanyak 25 unit. kondisi tersebut didorong oleh Terlaksananya Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya sebanyak 25 objek. Adapun upaya – upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi diatas adalah Tersedianya Data Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan sebanyak 32 objek.

Lalu faktor yang mendukung Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Seni dan Budaya adalah Meningkatnya kunjungan ke Museum dengan realisasi sebesar 201.324 orang. Kondisi tersebut didorong oleh Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Museum sebanyak 1 unit.

Di samping melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja, juga dilakukan pengukuran terhadap efisiensi penggunaan sumber daya anggaran. Sasaran yang berhasil dicapai dengan penggunaan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Berikut ini disajikan tabel analisis efisiensi penggunaan sumber daya :

Tabel 3.4  
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Jumlah Anggaran Tahun 2023 (A)	Rp.18.446.594.900
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2023 (B)	Rp.17.196.593.722
Prosentase Anggaran Tahun 2023	93,22 %
Efisiensi Anggaran (A-B)/A	Rp.1.250.001.178 = 6,78 %

Program yang mendukung pencapaian Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni dan budaya yaitu Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pengembangan Kesenian Tradisional dan Program Pelestarian, Pengelolaan Cagar Budaya dan Program Pengelolaan Permuseuman. Pagu anggaran yang mendukung pencapaian indikator Presentase peningkatan jumlah pelaku seni/ budaya sebesar Rp.18.446.594.900,- dan terealisasi Rp.17.196.593.722,- (93,22%).

**Sasaran ke 2 :**

**Meningkatnya kualitas tata kelola Pemeritahan yang efektif efisien dan akuntabel lingkup Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor**

Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor menetapkan indeks reformasi birokrasi lingkup PD dengan target tahun 2023 sebesar 81 (nilai).

Tabel 3.5  
Nilai PMPRB Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Indikator Kinerja	2022	2023			Akhir Renstra		Provin si	Nasion al
	Reali sasi	Target	Reali sasi	%	Target	%		
Indeks reformasi birokrasi lingkup PD	54,72	81 (nilai)	78,08 (nilai)	96,39 %	82	95,21 %	81.93	54.44

Berdasarkan Hasil Penilaian Tim Reformasi Birokrasi Tingkat Kota Bogor, Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor Tahun 2023 dapat terealisasi sebesar 78,08 dengan kategori BB dan capaian sebesar 96.39%. Jika dibandingkan dengan target akhir renstra, telah mencapai 95,21%. Capaian nilai indeks RB Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor lebih rendah dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Barat yang mencapai 81,93, namun lebih tinggi dari capaian rata-rata nasional sebesar 54,44.

Pencapaian kinerja indikator kinerja sasaran pada sasaran ini belum memenuhi target yang ditetapkan, hal ini menunjukkan kualitas tata kelola

dinas belum berada pada kondisi yang diharapkan, untuk dapat mencapai target pada tahun-tahun mendatang diperlukan peningkatan baik dari segi kinerja maupun pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Program yang mendukung pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pagu anggaran yang mendukung pencapaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor sebesar Rp.9.593.231.765,- dan terealisasi Rp.9.228.279.794,- (96,20%).

Tabel 3.4  
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Jumlah Anggaran Tahun 2023 (A)	Rp.9.593.231.765
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2023 (B)	Rp.9.228.279.794
Prosentase Anggaran Tahun 2023	96,20 %
Efisiensi Anggaran (A-B)/A	Rp.364.951.971 = 3,80 %

### Sasaran ke 3 :

#### Meningkatnya kunjungan wisata di Kota Bogor

Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor menetapkan indikator Persentase kunjungan wisatawan dengan target tahun 2023 sebesar 23,67 % dan Jumlah kunjungan wisatawan dengan target tahun 2023 adalah 5.174.645 orang

Tabel 3.6  
Persentase kunjungan wisatawan dan jumlah kunjungan wisatawan

Indikator Kinerja	2022	2023			Akhir Renstra		Provi nsi	Nasio nal
	Reali sasi	Target	Reali sasi	%	Targe t	%		
Persentase kunjungan wisatawan	23,67 %	23,67 %	22,78 %	96,24 %	23,67 %	96,24 %	-	-
Jumlah kunjungan wisatawan	5.174.645	5.174.645	5.650.637	109,21 %	6.399.090	88,30 %		

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa capaian sasaran meningkatnya kunjungan wisata di Kota Bogor dengan indikator persentase kunjungan wisatawan sebesar 22,78 % dari target 23,67 % terealisasi sebesar 96,24 % dan indikator jumlah kunjungan wisatawan sebesar 5.650.637 orang dari target 5.174.645 orang terealisasi sebesar 109,21 % menunjukkan capaian sangat tinggi.

Faktor yang mendukung Meningkatnya kunjungan wisata di Kota Bogor yaitu dengan tersedianya dokumen perencanaan pengembangan daya tarik wisata kabupaten/ kota sebanyak 1 dokumen, tersedianya dokumen perencanaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/ kota sebanyak 2 dokumen, tersedianya dokumen perencanaan destinasi pariwisata kabupaten/ kota sebanyak 1 dokumen dan laporan hasil pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata sebanyak 1 laporan.

Faktor lainnya yaitu terlaksananya peningkatan kualitas sdm pariwisata sebesar 255 orang. upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi diatas adalah terlaksananya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata sebanyak 1 kegiatan, terlaksananya pelatihan dasar sdm kepariwisataan bagi masyarakat, guru dan pelajar (mahasiswa dan/ atau siswa) sebanyak 1 kegiatan, terlaksananya fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata sebanyak 1 kegiatan.

Selanjutnya faktor yang mendukung Meningkatnya kunjungan wisata di Kota Bogor adalah Meningkatnya Pemasaran Pariwisata sebanyak 3 kegiatan. kondisi tersebut didorong oleh Tersedianya Data Jumlah Kunjungan wisatawan sebanyak 5.650.637 orang. Upaya - upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi diatas adalah tersedianya Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, & Media Lainnya Baik Dalam & Luar Negeri sebanyak 2 dokumen, Tersedianya Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri sebanyak 4 laporan. Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri sebanyak 1 dokumen.

Di samping melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja, juga dilakukan pengukuran terhadap efisiensi penggunaan sumber daya anggaran. Sasaran yang berhasil dicapai dengan penggunaan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Berikut ini disajikan tabel analisis efisiensi penggunaan sumber daya :

Tabel 3.7  
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Jumlah Anggaran Tahun 2022 (A)	Rp.2.453.715.700
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2022 (B)	Rp.2.419.769.010
Prosentase Anggaran Tahun 2022	98,62%
Efisiensi Anggaran (A-B)/A	Rp.33.946.690 = 1,38%

Program yang mendukung pencapaian meningkatnya kunjungan wisata di Kota Bogor yaitu Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pemasaran Pariwisata dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif. Pagu anggaran yang mendukung pencapaian indikator persentase kunjungan wisatawan dan indikator jumlah kunjungan wisatawan sebesar Rp.2.453.715.700,- dan terealisasi Rp.2.419.769.010,- (98,62%).

#### Sasaran ke 4 :

#### Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif di Kota Bogor

Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor menetapkan indikator Jumlah Pelaku ekonomi Kreatif baru dengan target tahun 2023 sebesar 35 pelaku.

Tabel 3.8  
Pengukuran Kinerja Indikator Jumlah pelaku ekonomi kreatif baru

Indikator Kinerja	2022	2023			Akhir Renstra		Provi nsi	Nasi onal
	Reali sasi	Target	Reali sasi	%	Target	%		
Jumlah Pelaku ekonomi Kreatif baru	32	35	65	185, 71%	40	162,5 %	-	-

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa capaian sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif di Kota Bogor dengan indikator Jumlah Pelaku ekonomi Kreatif baru sebesar 185,71 % dari target 35 pelaku terealisasi sebesar 65 pelaku menunjukkan capaian yang sangat tinggi.

Faktor yang mendukung Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif di Kota Bogor yaitu ditandai laporan hasil fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi, dan konservasi ekonomi kreatif sebanyak 1 laporan, jumlah orang yang mengikuti pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan ekonomi kreatif sebanyak 100 orang.

Di samping melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja, juga dilakukan pengukuran terhadap efisiensi penggunaan sumber daya anggaran. Sasaran yang berhasil dicapai dengan penggunaan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Berikut ini disajikan tabel analisis efisiensi penggunaan sumber daya :

Tabel 3.10  
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Jumlah Anggaran Tahun 2022 (A)	Rp.468.943.300
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2022 (B)	Rp.461.585.200
Prosentase Anggaran Tahun 2022	98,43 %
Efisiensi Anggaran (A-B)/A	7.358.100 = 1,57 %

Berdasarkan hasil analisis efisiensi terhadap penggunaan sumber daya, maka dapat dikatakan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 1,57 % dalam pelaksanaan program dan kegiatan terhadap pencapaian indikator Jumlah pelaku ekonomi kreatif baru.

Total anggaran yang direncanakan untuk mendukung sasaran Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Bogor sebesar Rp.468.943.300,- terealisasi sebesar Rp.461.585.200,- jika diprosentasekan sebesar 98,43%.

## B. REALISASI ANGGARAN

Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor selama Tahun 2023 didukung berbagai program baik yang berdampak langsung maupun tidak berdampak langsung. Secara umum, pelaksanaan program untuk mendukung setiap sasaran berjalan dengan baik. Besaran anggaran yang menunjang pencapaian sasaran sebesar Rp.30.962.485.665,- Pada akhir tahun 2023, anggaran ini terealisasi sebesar Rp.29.306.227.726,- atau sebesar 94,65%.



## C. ANALISIS EFISIENSI

Analisis efisiensi pada pelaporan ini didasarkan pada sasaran yang kinerjanya mencapai 100% dan terdapat sisa anggaran yang tidak terserap pada masing-masing sasaran. Dari 4 sasaran, terdapat 3 sasaran yang capaian kinerjanya sudah mencapai/melebihi target, dengan tingkat efisiensi sebesar 2,683% yang rinciannya sebagai berikut:

1. Kinerja Sasaran “Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni dan budaya” tercapai melalui Kinerja “Persentase Peningkatan jumlah pelaku seni/ budaya” sebesar 248,05% dan efisiensi anggaran sebesar 6,78%.
2. Kinerja Sasaran “ Meningkatkan kunjungan wisata di Kota Bogor” tercapai melalui kinerja “Jumlah kunjungan wisatawan” sebesar 109,21% dan efisiensi anggaran sebesar 1,38%.
3. Kinerja Sasaran “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif di Kota Bogor” tercapai melalui kinerja “Jumlah Pelaku ekonomi Kreatif baru” sebesar 185,71 % dan efisiensi anggaran sebesar 1,57%.



## BAB IV P E N U T U P

### A. Kesimpulan

LKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya dalam lingkup tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor selama tahun 2023. LKIP ini memuat hasil pengukuran kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor Tahun 2023. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor pada tahun 2023 berhasil mencapai kinerja dengan sangat baik. Dari hasil penilaian terhadap sasaran yang telah ditetapkan dalam IKU, didapat hasil sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 4.1  
Capaian IKU Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni dan budaya	Presentase peningkatan jumlah pelaku seni/ budaya	30,84 %	76.50 %	248,05%
2	Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel di lingkup Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi di lingkungan Perangkat Daerah	81 poin	78,08 poin	96,39%
3	Meningkatnya kunjungan wisata di Kota Bogor	Persentase kunjungan wisatawan	23,67 %	22,78 %	96,24%
		Jumlah kunjungan wisatawan	5.174.645 orang	5.650.637 orang	109,21%
4	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif di Kota Bogor	Jumlah Pelaku ekonomi Kreatif baru	35	65	185,71%
					<b>147,12%</b>



Secara umum walaupun tidak semua indikator kinerja sasaran tercapai memenuhi target yang telah ditetapkan, jika dilihat dari rata-rata pencapaian target kinerja sasaran Disparbud Tahun 2023 sebesar **147,12%** maka rata-rata pencapaian target kerjanya termasuk dalam kategori baik .

Tingkat capaian indikator sasaran tersebut akan menjadi bahan evaluasi agar program dan kegiatan Disparbud ditahun mendatang dapat menyokong tercapainya target indikator sasaran yang sudah ditetapkan.

Berikut ini beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2023 :

1. Kapasitas dan Kompetensi SDM yang masih harus terus ditingkatkan didalam menunjang pelayanan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor dituntut untuk dapat melakukan pembenahan, baik yang terkait dengan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana serta Anggaran yang tersedia didalam DPA yang sudah disahkan sebelumnya.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil analisis kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor tahun 2023, maka untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan;
2. Meningkatkan manajemen kinerja agar setiap kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu dan tepat sasaran;
3. Melakukan analisa, evaluasi dan monitoring secara kontinyu dan terpadu sebagai bahan perbaikan pada tahun berikutnya.
4. Melakukan penyesuaian besaran target kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.